



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Renja Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur Jambi 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Kami menyadari, sangat dimungkinkan dalam penyusunan rancangan awal Renja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ke depan.

Besar harapan kami Program dan Kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini dapat terlaksana untuk mewujudkan Jambi MANTAP 2021-2026.

Terima Kasih..

Jambi, Oktober 2024

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi



Ir. Rumusdar
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	6
1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	32
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	62
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	73
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025	73
BAB V. PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d. TRW III Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	10
Tabel 2.2. Laporan Realisasi Keuangan APBD Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	27
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	32
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025	44
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sektor Pertanian Provinsi Jambi Tahun 2025	52
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi .	66
Tabel 3.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	69
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2024 ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD & APBD. Dokumen Renja Perubahan OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan di sektor pertanian khususnya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan musrenbang, perumusan akhir Renja dan penetapan Renja melalui peraturan kepala daerah. Renja tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD tahun 2021 – 2026. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun 2025 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target tahun keempat yang ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jambi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Akhir Renja tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jambi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2025 (Januari 2021 – Januari 2025, 4 tahun), oleh karena itu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari skema RPJMD 2021-2026 atau sebagai tindak lanjut dari Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 serta Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6), memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun

2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e- government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014- 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturean Gubernur No 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu sebagai dasar bagi seluruh pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.4 Sistematika Dokumen Renja SKPD

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan OPD tahun lalu dan pencapaian renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Rencana Kerja OPD tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun 2023 Daerah
dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	B	B	B	100	BB				
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengangara (Dokumen)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9	Dokumen	7	Dokumen	77,8
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15 Dokumen	7 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	15	Dokumen	12	Dokumen	80
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan (laporan)	7 Laporan	7 Laporan	7 Dokumen	7 Laporan	100	7	Laporan	6	Laporan	85,7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	- Laporan	-	2	Laporan	1	Laporan	50
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan (Laporan)	5 Laporan	5 Bulan	5 Laporan	5 Laporan	100	5	Laporan	3	Laporan	60
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	3.864 Org/Bln	3894 Bulan	3.864 Org/Bln	3.864 Org/Bln	100	3.864	Org/Bln	2.665	Org/Bln	69
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	Dokumen	8	Dokumen	66,7
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian (Laporan)	3 Laporan	1 Bulan	3 Laporan	3 Laporan	100	3	Laporan	2	Laporan	66,7
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	566 Paket	- Paket	566 Paket	566 Paket	100	-	Paket	-	Paket	-
3.27.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7 Dokumen	6 Bulan	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7	Dokumen	4	Dokumen	57,1
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28 Orang	- Orang	20 Orang	20 Orang	100	-	Orang	-	Orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)	7 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7	Laporan	5	Laporan	71
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Buah	12 Paket	12 Paket	100	12	Paket	9	Paket	75
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100	12	Paket	9	Paket	75
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10 Paket	- Paket	- Paket	- Paket	-	10	Paket	9	Paket	90
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100	12	Paket	9	Paket	75
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100	12	Paket	9	Paket	75
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Prundangundangan yang Disediakan (Dkumen)	3 Dokumen	3 Jenis	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3	Dokumen	-	Dokumen	-

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	12	Tahun	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	9	Laporan	75
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	128	Unit	0	Unit	99	Unit	1	Unit	100	128	Jenis	100	Jenis	78,1
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	Unit	-	Unit	1	Unit	1	Unit	100	5	Unit	-	Unit	-
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	Unit	-	Unit	60	Unit	-	Unit	-	100	Unit	100	Unit	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)	4	Jenis	3	Bulan	4	Jenis	4	Jenis	100	4	Jenis	3	Jenis	75
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Lapooran	12	Bulan	12	Lapooran	12	Lapooran	100	12	Lapooran	9	Lapooran	75
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	9	Laporan	75

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	9	Laporan	75
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	437	Unit	319	Bulan	352	Unit	335	Unit	95,2	411	Unit	102	Unit	24,8
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	375	Unit	309	Bulan	325	Unit	325	Unit	100	350	Unit	250	Unit	71,4
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	Unit	10	Paket	10	Unit	10	Unit	100	11	Unit	-	Unit	-
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)	21	%	13	%	17	%	17	%	100	19	%	5	%	26,3
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11	Laporan	11	Laporan	100
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	133 Sertifikat	100 Kab/Kota	110 Sertifikat	110 Sertifikat	100	121	Sertifikat	80	Sertifikat	66,1
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Laporan)	11 Laporan	4 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	-	Laporan	-	Laporan	-
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran (Dokumen)	7 Dokumen	7 Kg	7 Dokumen	7 Dokumen	100	-	Dokumen	-	Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.1.02.05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan Harga (Laporan)	11 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	-	11	Laporan	11	Laporan	100
3.27.02.1.04	Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	8 Dokumen	8 ekor	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8	Dokumen	4	Dokumen	50

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	4 Laporan	3 Kg	4 Laporan	3 Laporan	75	-	Laporan	-	Laporan	-
3 27 02 1.04 03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Orang)	39 Orang	11 Orang	39 Orang	39 Orang	100	-	Orang	-	Orang	-
3 27 02 1.04 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	4 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	-	4	Laporan	3	Laporan	75

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 27 02 1.04 05	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	39 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	-	39	Orang	30	Orang	77
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	9.000 Ekor	7.885 ekor	13.970 Ekor	13.652 Ekor	71,68	-	Ekor	-	Ekor	-
3.27.02.1.07.02	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	600 Ton	125 Unit	500 Ton	500 Ton	100	500	Ton	150	Ton	30
3.27.02.1.07.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	9.000 Ekor	- ekor	- Ekor	- Ekor	-	8.000	Ekor	-	Ekor	-
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)	17 %	11 %	13 %	13 %	100	15	%	7	%	47

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis (Dokumen)	11 Dokumen	11 Kab/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11	Dokumen	8	Dokumen	75
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	7 Dokumen	7 Paket	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7	Dokumen	6	Dokumen	83
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	11 Dokumen	11 Kab/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11	Dokumen	-	Dokumen	-
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	6 Laporan	6 Kab/Kota	6 Laporan	6 Laporan	100	6	Laporan	5	Laporan	80
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	15 Unit	- Unit	10 Unit	10 Unit	100	10	Unit	6	Unit	65

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya keswan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi (%)	10 %	7 %	8 %	8 %	100	9	%	6	%	67
3.27.04.1.01	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100
3.27.04.1.01.01	Pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	11 Laporan	11 ekor	11 Laporan	11 Laporan	100	-	Laporan	-	Laporan	-
3.27.04.1.01.07	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	11 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	-	11	Laporan	11	Laporan	100

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Laporan)	11 Laporan	11 Sampel	11 Laporan	11 Laporan	100	-	Laporan	-	Laporan	-
3.27.04.1.02.07	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	11 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	-	11	Laporan	11	Laporan	100
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sampel)	2.500 Sampel	2.000 Sampel	2.500 Sampel	2.500 Sampel	100	2.500	Sampel	1.623	Sampel	65
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen)	1 Dokumen	1 Sampel	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	18 NKV	0 NKV	12 NKV	0 NKV	0	15	NKV	4	NKV	27

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3.27.04.1.05.03	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]	15 Sertifikat	- Sertifikat	12 Sertifikat	- Sertifikat	-	15 Sertifikat		4 Sertifikat		27
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	35,24 %	25,74 %	29,24 %	29,24 %	100	32,34 %		22 %		68
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Terkendalnya wilayah yang terdampak serangan OPT,Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota		11 Kab/Kota		100
3.27.05.1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	150 Hektar	100 Hektar	125 Hektar	125 Hektar	100	125 Hektar		84 Hektar		67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (%)	Penerbitan Izin Usaha Pertanian di Kabupaten / kota	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10	%	10	%	100
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3	Laporan	3	Laporan	100
3.27.06.1.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Laporan)	1 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	-	1	Laporan	1	Laporan	100
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	3 Laporan	3 Kelompok	3 Laporan	3 Laporan	100	-	Laporan	-	Laporan	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya	2 %	2 %	2 %	2 %	100	2	%	1	%	50
3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya jumlah penyuluh pertanian yang terlatih (Orang)	125 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	-	115	Orang	72	Orang	63
3.27.07.1.01.04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	60 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	-	55	Orang	35	Orang	64

Ranhir Renja DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	5 Dokumen	5 Kab/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5	Dokumen	4	Dokumen	80
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	35 Kelompok	10 Orang	25 Kelompok	25 Kelompok	100	30	Kelompok	18	Kelompok	60
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11	Kab/Kota	11	Kab/Kota	100
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	19 Unit	10 Poktan	11 Unit	11 Unit	100	-	Unit	-	Unit	-
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	11 Unit	- Poktan	- Unit	- Unit	-	11	Unit	7	Unit	64

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap Pencapaian Target

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan program/kegiatan sebanyak 7 program 21 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Dengan reliasasi pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan mencapai 83,5 %. Pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi capaian target hanya sebesar 75 % dari target 4 laporan terealisasi 3 laporan, hal ini disebabkan untuk penyediaan ternak sapi sebanyak 19 ekor tidak dapat terlaksanan karena tidak adanya ketersediaan ternak di wilayah sumber bibit sapi yang sesuai dengan spek yang di tetapkan oleh Dinas TPHP. Untuk Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pencapaian target sebesar 71,68 % dari target 13.970 ekor terealisasi sebanyak 13.652 ekor, hal ini disebabkan oleh sulitnya mencari dan mengumpulkan ternak sapi dengan spesifikasi yang telah di tetapkan dan pada saat yang bersamaan hampir semua Daerah/Provinsi mencari ternak sapi di sumber bibit untuk kebutuhan pengadaan ternak sapi, masih sulitnya pemahaman penyedian terhadap persyaratan ijin lalulintas ternak yang baru di berlakukan mulai tahun 2023 yang menyebabkan waktu pengurusan ijin pemasukan ternak menjadi lebih lama.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2023 aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional sebesar Rp 104.704.346.641,-. Realisasi Belanja sebesar Rp 96.070.691.375,- atau sebesar 91,75 % dengan realisasi fisik sebesar 93,82 %. Tidak tercapai realisasi sebesar 100 % di sebabkan karena adanya pengadaan ternak sapi sebanyak 296 ekor tidak dapat terlaksana dikarenakan spesifikasi ternak sapi tidak tersedian di wilayah sumber bibit ternak sapi.

Tabel 2.2.

Laporan Realisasi Keuangan APBD TRW III Tahun 2024
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Program / Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		39.830.488.017	26.949.411.359	67,9	73,2	12.881.076.658
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		973.998.189	625.957.250	64,27	77,84	348.040.939
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	456.225.983	337.338.700	73,94	79,58	118.887.283
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtiarRealisasi Kinerja	242.236.496	120.601.200	49,79	88,93	121.635.296
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.535.710	168.017.350	60,98	65,22	107.518.360
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.549.470.472	25.166.169.257	68,86	68,89	11.383.301.215
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.844.830.472	24.723.069.257	68,97	68,97	11.121.761.215
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	704.640.000	443.100.000	62,88	65,00	261.540.000
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		309.000.000	187.040.000	60,53	60,53	121.960.000
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	309.000.000	187.040.000	60,53	60,53	121.960.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		145.010.000	138.472.200	95,49	100,00	6.537.800
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.983.100	99,72	100,00	16.900
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.750.000	8.750.000	100,00	100,00	0
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.060.000	11.423.200	75,85	100,00	3.636.800
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.200.000	9.865.000	96,72	100,00	335.000

No	Program / Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.925.000	98,50	100,00	75.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	97.525.900	97,53	100,00	2.474.100
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		18.747.500	16.250.000	86,68	100,00	2.497.500
1	Pengadaan Mebel	18.747.500	Rp16.250.000	86,68	100,00	2.497.500
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		725.840.000	537.777.121	74,09	80,15	188.062.879
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577.340.000	433.277.721	75,05	75,05	144.062.279
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	7.500.000	7.499.400	99,99	100,00	600
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.000.000	97.000.000	68,79	100,00	44.000.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.108.421.856	277.745.531	25,06	25,05	830.676.325
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.421.856	198.856.800	71,42	71,42	79.565.056
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	830.000.000	78888731	9,50	9,50	751.111.269
II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		17.187.656.160	7.020.040.982	58,1	68,9	10.167.615.178
1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		4.870.000.000	4.251.144.454	87,29	94,52	618.855.546
1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	4.705.000.000	4.135.761.806	87,90	95,34	569.238.194
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	165.000.000	115.382.648	69,93	71,26	49.617.352

No	Program / Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		1.213.000.000	853.496.432	70,36	70,49	359.503.568
1	Pengelolaan Penerbitan sertifikat Sertifikat Benih	336.000.000	220.714.237	65,69	66,15	115.285.763
2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	877.000.000	632.782.195	72,15	72,15	244.217.805
3. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,Serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.218.000.000	771.063.700	63,31	73,81	446.936.300
1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,serta pakan kewenangan provinsi	112.000.000	47.711.600	42,60	42,60	64.288.400
2	Pengembangan dan Pelaksanaan sistem manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.068.000.000	720.412.100	67,45	76,82	347.587.900
3	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	38.000.000	2940000	7,74	81,25	35.060.000
4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Lain		9.886.656.160	1.144.336.396	11,57	36,59	8.742.319.764
1	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Provinsi lain	931.156.160	866.196.346	93,02	100,00	64.959.814
2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	8.955.500.000	278.140.050	3,11	30,00	8.677.359.950

No	Program / Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		10.117.327.605	7.499.641.079	74,1	75,3	2.617.686.526
1. Penataan Prasarana Pertanian		10.117.327.605	7.499.641.079	74,13	75,29	2.617.686.526
1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.208.000.000	2.550.232.420	79,50	83,16	657.767.580
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.081.598.605	2.475.120.315	80,32	80,32	606.478.290
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta sarana Pendukungnya	3.827.729.000	2.474.288.344	64,64	64,64	1.353.440.656
IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1.652.000.000	804.671.980	48,5	57,7	847.328.020
1. Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		701.000.000	351.737.800	50,18	79,57	349.262.200
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	701.000.000	351.737.800	50,18	79,57	349.262.200
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		128.000.000	71.764.400	56,07	61,34	56.235.600
1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	128.000.000	71.764.400	56,07	61,34	56.235.600
3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		460.000.000	298.138.580	64,81	64,90	161.861.420

No	Program / Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	460.000.000	298.138.580	64,81	64,90	161.861.420
4. Kesejahteraan Hewan		363.000.000	83.031.200	22,87	25,02	279.968.800
1	Pengelolaan Penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	363.000.000	83.031.200	22,87	25,02	279.968.800
V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		535.000.000	361.170.363	67,5	67,5	173.829.637
1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		535.000.000	361.170.363	67,51	67,51	173.829.637
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	535.000.000	361.170.363	67,51	67,51	173.829.637
VI. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		25.000.000	24.970.000	100	100	30.000
Penerbitan izin usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	24.970.000	99,88	100,00	30.000
1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	25.000.000	24970000	99,88	100,00	30.000
VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		646.000.000	364.756.150	55,3	62,2	281.243.850
1. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian		45.000.000	26.616.250	59,15	62,48	18.383.750
1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	45.000.000	26.616.250	59,15	62,48	18.383.750
2. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian		547.000.000	311.218.650	56,90	64,24	235.781.350
1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	80.000.000	58.366.250	72,96	84,95	21.633.750
2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	467.000.000	252.852.400	54,14	60,69	214.147.600

No	Program / Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		54.000.000	26.921.250	49,85	60,03	27.078.750
1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	54.000.000	26.921.250	49,85	60,03	27.078.750
TOTAL		69.993.471.782	43.024.661.913	61,47	66,53	26.968.809.869

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada tahun 2024 diukur melalui beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data IKK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilihat di Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian 2023	Proyeksi			Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026		2024*	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<i>Pertanian</i>											
3.1	Persentase peningkatan produksi Cabe Merah Besar (%)			20	20	20	20	52,44	10,72	20	20	20
3.2	Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (%)			10	10	10	10	18,74	-32,16	10	10	10
3.3	Populasi Ternak (Sapi dan Kambing)											
	- Persentase peningkatan Populasi Sapi (%)			1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	-37	1,5	1,5	1,5
	- Persentase peningkatan Populasi Kambing (%)			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-73	1,5	1,5	1,5
3.4	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT			24,51	25,03	25,32	25,6	24,51	25,03	25,32	25,32	25,6

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026		2024*	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.5	Persentase peningkatanProduksi Padi (%)			2	2	2	2	-1,61	-7,79	2	2	2
3.6	Persentase peningkatanProduksi Jagung (%)			1	1	1	1	-32,2	-26,32	1	1	1
3.7	Persentase peningkatan Produksi Daging (%)											
	- Sapi			2,5	2,5	2,39	2,39	0,5	-66,06	2,5	2,39	2,39
	- Kambing			1	1	1,8	1,8	5	-59,65	1	1,8	1,8
	- Ayam Buras			5,5	5,5	5,52	5,52	11,8	-86,98	5,5	5,52	5,52
	- Ayam Ras Petelur			10	10	10,47	10,47	50	-94,02	10	10,47	10,47
	- Ayam Ras Pedaging			15	15	15,01	15,01	18,5	-85,93	15	15,01	15,01
	- Itik			0,35	0,35	0,4	0,4	9,45	-98,19	0,35	0,4	0,4

Persentase Peningkatan Produksi Padi dengan target 2% merupakan angka penetapan Kinerja Kepala Dinas melalui Bidang Tanaman Pangan sedangkan realisasi -1,61% merupakan angka sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas TPH Nak Provinsi Jambi Tahun 2023 yaitu 273.276 ton dikurangi dengan angka IKU 2022 yaitu 277.744 ton dibagi angka IKU 2022 dikali 100. Sedangkan hasil % capaian di dapat dari angka realisasi dibagi angka target dikali 100, dengan demikian -1,61% dibagi dengan 2% dikali dengan 100 maka menghasilkan -80,5.

Persentase Peningkatan Produksi Jagung dengan target 1% merupakan angka penetapan Kinerja Kepala Dinas melalui Bidang Tanaman Pangan sedangkan realisasi -32,20% merupakan angka sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas TPH Nak Provinsi Jambi Tahun 2023 yaitu 20.754 ton dikurangi dengan angka IKU 2022 yaitu 30.610 ton dibagi angka IKU 2022 dikali 100. Sedangkan hasil % capaian di dapat dari angka realisasi dibagi angka target dikali 100, dengan demikian -32,20% dikali dengan 100 maka menghasilkan -3220.

Dari 2 indikator tersebut untuk indikator peningkatan produksi padi dan jagung tidak tercapai. Penyebab dari tidak tercapainya target pada komoditi padi dan jagung

disebabkan karena dampak dari fenomena elnino yang terjadi dipertengahan tahun 2023 (Juli – Oktober) yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal. Selain itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi. Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

b. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada tahun 2023, terjadinya kekeringan dampak dari fenomena elnino diperparah dengan dampak kebakaran hutan dan banjir yang cukup tinggi dan di Provinsi Jambi. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergeseran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

c. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping

itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a) Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
- b) Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
- c) Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
 - Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 - Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
 - Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
 - Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
 - Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
 - Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
- d) Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.

- e) Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

d. Masih Berfluktuatifnya Produktivitas dan Produksi Tanaman Hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah – buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat-saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

e. Relatif Masih Terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Disadari saat ini tingkat pendidikan dan keterampilan petani masih ada yang rendah. Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta masih ada yang belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (*indigenous knowledge*).

Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
- Masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Rendahnya Nilai Tambah Produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik. Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

- a. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
- b. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

g. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembanganteknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdanai, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

h. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

i. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - Perlatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.
- b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kreteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
- c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
- d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
- e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

j. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT.

Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

- a. Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- b. Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
- c. Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

k. Masih Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- a. Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- b. Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- c. Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- d. Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

l. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan

desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

m. Usaha Peternakan yang bersifat Subsiten dan Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Peternak.

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pngelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak. Rendanya partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak.

n. Keterbatasan Lahan untuk Subsektor Peternakan

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian

lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah sehingga terjadi Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan langkah awal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Jambi.

Secara lengkap dan rinci, review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				99.185.879.956	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				50.230.196.795	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	48.924.460.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	39.042.685.083	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengangara (Dokumen)	Kota Jambi	7	2.200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengangara (Dokumen)	Kota Jambi	9	1.227.304.309	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		15	1.050.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		15	457.304.309	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)		7	700.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)		7	240.000.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	450.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	530.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan (Laporan)	Kota Jambi	5	37.822.356.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan (Laporan)	Kota Jambi	5	36.045.248.486	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		3.864	36.757.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		3.864	35.341.112.486	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)		12	1.064.856.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)		12	704.136.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian (Laporan)	Kota Jambi	3	750.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian (Laporan)	Kota Jambi	3	309.272.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1.3.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		7	750.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		7	309.272.400	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)	Kota Jambi	7	985.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)	Kota Jambi	7	183.324.388	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	8.935.030	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	325.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	9.990.500	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		10	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		10	19.704.018	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		12	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		12	19.700.000	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	4.994.840	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	120.000.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)		118	297.104.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)		118	50.000.000	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		100	297.104.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		100	50.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jenis)	Kota Jambi	4	1.270.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jenis)	Kota Jambi	4	827.535.500	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	950.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	677.340.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	80.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	9.195.500	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	240.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	141.000.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	Kota Jambi	437	5.600.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	Kota Jambi	437	400.000.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		375	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		375	300.000.000	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		12	4.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		12	100.000.000	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)		21	35.405.419.956	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)		21	4.594.078.135	
2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	4.025.000.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	1.235.980.400	
2.1.1	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		11	2.675.000.000	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		11	1.136.000.000	
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)		1	1.350.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)		1	99.980.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	11 Kab/Kota	11	5.028.419.956	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	11 Kab/Kota	11	1.017.297.735	
2.2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		133	399.000.000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		133	336.000.000	
2.2.2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan Harga (Laporan)		11	1.399.000.000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan Harga (Laporan)		11	615.397.110	
2.2.3	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		25.000	1.650.000.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		25.000	27.495.625	
2.2.4	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		300	1.580.419.956	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		300	38.405.000	
2.3	Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	3.400.000.000	Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	876.000.000	
2.3.1	Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)		8	1.100.000.000	Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)		8	86.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
2.3.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)		4	2.300.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)		4	790.000.000	
2.3.3	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)		0	-	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)		39	-	
2.4	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	22.952.000.000	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	1.464.800.000	
2.4.1	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)		600	800.000.000	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)		600	392.800.000	
2.4.2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		9.000	22.152.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		9.000	1.072.000.000	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)		17	10.501.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)		17	4.250.521.185	
3.1	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis (Dokumen)	11 Kab/Kota	11	10.501.000.000	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis (Dokumen)	11 Kab/Kota	11	4.250.521.185	
3.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		7	2.301.000.000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		7	1.508.410.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usha Tani	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dkumen)		0	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usha Tani	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dkumen)		11	100.000.000	
3.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		6	5.800.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		6	2.642.110.535	
3.1.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		15	2.400.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		15	-	
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya keswan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi (%)		10	2.470.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya keswan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi (%)		10	1.198.000.561	
4.1	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	950.000.000	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	374.000.000	
4.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)		11	950.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)		11	374.000.000	
4.2	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	420.000.000	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	139.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
4.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)		11	420.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)		11	139.000.000	
4.3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sampel)	11 Kab/Kota	3000	800.000.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sampel)	11 Kab/Kota	3000	500.000.561	
4.3.1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen)		1	800.000.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen)		1	500.000.561	
4.4	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		18	300.000.000	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		18	185.000.000	
4.4.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]		15	300.000.000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]		15	185.000.000	
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%)		10	880.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%)		10	498.138.645	
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Terkendalnya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab/Kota	11	880.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Terkendalnya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab/Kota	11	498.138.645	
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		150	650.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		150	474.768.645	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
5.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		16	100.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		16	8.970.000	
5.1.3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Ha)		6	130.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Ha)		6	14.400.000	
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian di Kabupaten / kota (%)		3	150.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian di Kabupaten / kota (%)		3	-	
6.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	11 Kab/Kota	3	150.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	11 Kab/Kota	3	-	
6.1.1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Laporan)		3	150.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Laporan)		3	-	
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)		2	855.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)		2	646.773.186	
7.1	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya jumlah penyuluh pertanian yang terlatih (Orang)		125	-	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya jumlah penyuluh pertanian yang terlatih (Orang)		125	-	
7.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		0	-	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		65	-	
7.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota		11	405.000.000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota		11	341.826.750	
7.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)		5	130.000.000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)		5	62.868.000	
7.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		35	275.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		35	278.958.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
7.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasiskawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	450.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasiskawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	304.946.436	
	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)		19	450.000.000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)		19	304.946.436	
7.3.1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)		0	-	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)		11	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2024 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Provinsi Jambi. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat. Hal ini berarti, Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Perangkat Daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui modul e-Musrenbang yang menjadi bagian dari sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi (e-Planning). Untuk tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memiliki usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sektor Pertanian Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I	Sub Sektor Tanaman Pangan				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
1	Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Merangin	- Padi inbrida	500 Ha	Kec. Tabir Ulu, Tabir, Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Jangkat
2			- Jagung Hibrida	200 Ha	Kec. Pamenang Selatan, Renah Pamenang, Tabir Selatan, Margo Tabir, Pamenang Barat
3			- Pengembangan Kacang Tanah	100 Ha	Kec. Pamenang Selatan, Pamenang, Tabir Selatan, Renah Pamenang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4		Kab. Kerinci	- Padi inbrida	300 Ha	
5			- Jagung Hibrida	100 Ha	Kec Batang Merangin, Danau Kerinci Depati Tujuh, Gunung Kerinci
6			- Pengembangan Kacang Tanah	100 Ha	Kec Bukit Kerman
7		Kab. Bungo	- Padi inbrida	365 Ha	Kec. Bathin III Ulu
8			- Pengembangan Kacang Tanah	10 Ha	Kec. Tanah Sepenggal, Kec. Tn. Sepenggal Lintas
9		Kab. Batanghari	- Bantuan benih padi bersertifikat	1.500 Ha	Kecamatan Maro Sebo Ulu, Mersam, Muara tembesi dan Muara Bulian
10			- Pengembangan Kacang Tanah	100 Ha	Kecamatan Bajubang, Pemayang, Batin XXIV dan Maro Sebo Ilir
11		Kab. Sarolangun	- Padi inbrida	500 Ha	
12			- Jagung Hibrida	200 Ha	
13			- Pengembangan Kacang Tanah	30 Ha	
14		Kab. Tebo	- Padi inbrida	1.147 Ha	Kec. Tebo Ilir, Sumay, Muara Tabir
15		Kab. Tanjab. Timur	- Padi inbrida	1.000 Ha	Kec. Nipah panjang, berbak, Rantau Rasau, geragai, dendang, muara sabak barat, muara sabak timur
16			- Jagung Hibrida	100 Ha	Kec. Nipah Panjang, Berbak, Rasau, Dendang, Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur
17			- Pengembangan Kacang Tanah	50 Ha	Kec. Dendang, Geragai, Mendahara Ulu
18		Kab. Tanjab. Barat	- Jagung Hibrida	500 Ha	Kec. Bram Hitam, Rendah Mendaluh, Merlung, Tungkal Ilir, Tebing Tinggi
19			- Pengembangan Kacang Tanah	150 Ha	Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Rendah Mendaluh, Kec. Ma. Papalih
20		Kab. Muaro Jambi	- Padi inbrida	1.000 Ha	Kec. Kumpeh Ulu, Kumpeh, Maro Sebo
21			- Jagung Hibrida	200 Ha	Kec. Bahar Selatan, Bahar Utara, Sungai Bahar
22		Kota Jambi	- Padi inbrida	500 Ha	Kec. Telanaipura, Danau Teluk, Pelayangan dan Jambi Timur
23			- Jagung Hibrida	50 Ha	Kec. Alam Barajo, Kota Baru, Jambi Timur
24			- Pengembangan Kacang Tanah	15 Ha	Kec. Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura, Jambi Timur, Alam Barajo, Kota Baru
25		Kota Sungai Penuh	- Jagung Komposit	20 Ha	Kec Pesisir Bukit, Pondok Tinggi, Sungai Bungkal, Kumun Debai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
II	Sub Sektor Hortikultura				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
1	Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Merangin	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	10 Ha	Kec. Bangko, Pamenang Selatan, Renah Pamenang, Pamenang Barat
2			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	15 Ha	Kec. Jangkat, Lembah Masurai, Renah Pamenang, Pamenang Selatan
3		Kab. Kerinci	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	10 Ha	Kec. Bukit Kerman
4			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	15 Ha	Kec. Bukit Kerman
5			- Pengembangan Kawasan Kentang	50 Ha	Kec. Gunung Tujuh
6		Kab. Bungo	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	20 Ha	Kec. Bathin III Ulu
7			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	33 Ha	Kec Bungo Dani, Bathin III Ulu, Pelepat Ilir, Pelepat, Muko-muko Batin Tujuh, Bathin II Babeko
8		Kab. Batanghari	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	5 Ha	Kecamatan Bathin XXIV, Pelayung
9			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	30 Ha	Kecamatan Maro Sebo ilir, Pelayung, Bathin XXIV, Muaro Bulian
10		Kab. Sarolangun	- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	10 Ha	Kec. Singkut, Kec. Pelawan, Kec. Sarolangun, Kec. Pauh
11		Kab. Tebo	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	10 Ha	Kec. Kec. Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir
12			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	18 Ha	Kec. Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Rimbo Ulu, Sumay, Tengah Ilir, VII Koto Ilir, VII Koto, Tebo Tengah
13		Kab. Tanjab. Timur	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	4 Ha	Kec. Dendang, kuala jambi, muara sabak timur
14			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	20 Ha	Kec. Sadu, nipah panjang, rantau rasau, mendahara, geragai, dendang, muara sabak timur
15		Kab. Tanjab. Barat	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	2 Ha	Kec. Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Betara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
16			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	5 Ha	Kec. Kec. Pengabuan dan Kec. Batang Asam
17		Kab. Muaro Jambi	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	10 Ha	Kec K.Ulu, S.Gelam
18			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	15 Ha	Kec. Kumpeh, Sungai Gelam
19		Kota Jambi	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	5 Ha	Kec. Paal Merah (3 Ha), Kec. Danau Teluk (1 Ha), Kec. Alam Barajo (1 Ha)
20			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	5 Ha	Kec. Jambi Timur (2 Ha), Kec. Danau Sipin (1 Ha), Kec. Paal Merah (2 Ha)
21		Kota Sungai Penuh	- Pengembangan Kawasan Bawang Merah	4 Ha	Kec. Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Pesisir Bukit, Kumun Debai
22			- Pengembangan Kawasan Cabai Merah	8 Ha	Kec. Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Pesisir Bukit, Kumun Debai
III	Sub Sektor Peternakan				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
1	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Kab. Merangin	- Pengadaan Ternak Sapi	20 ekor	
2			- Pengadaan Ternak Kambing	200 ekor	
3			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	1.000 ekor	
4			- Penyediaan Mesin Chopper	3 Unit	
5		Kab. Kerinci	- Pengadaan Ternak Sapi	100 ekor	
6			- Pengadaan Ternak Kambing	100 ekor	
7			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	1.000 ekor	
8			- Pengadaan Ternak Itik Lokal	1.000 ekor	
9		Kab. Bungo	- Pengadaan Ternak Sapi	100 ekor	
10			- Pengadaan Ternak Kambing	100 ekor	
11			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	1.000 ekor	
12			- Pengadaan Ternak Itik Lokal	1.000 ekor	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
13		Kab. Batanghari	- Pengadaan Ternak Kerbau	20 ekor	
14			- Pengadaan Ternak Kambing	550 ekor	
15			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	500 ekor	
16			- Pengadaan Ternak Itik Lokal	1.000 ekor	
17			- Penyediaan Mixer Pengolah Pakan	3 Unit	
18			- Penyediaan Shreeder	3 Unit	
19		Kab. Sarolangun	- Pengadaan Ternak Sapi	70 ekor	
20			- Pengadaan Ternak Kerbau	30 ekor	
21			- Pengadaan Ternak Kambing	60 ekor	
22			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	1.000 ekor	
23			- Pengadaan Ternak Itik Lokal	1.000 ekor	
24		Kab. Tebo	- Pengadaan Ternak Sapi	50 ekor	
25			- Pengadaan Ternak Kambing	150 ekor	
26			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	300 ekor	
27			- Penyediaan Bibit Rumput	5 Ha	
28		Kab. Tanjab. Timur	- Pengadaan Ternak Sapi	30 ekor	
29			- Pengadaan Ternak Kambing	50 ekor	
30			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	1.000 ekor	
31			- Pengadaan Ternak Itik Lokal	1.000 ekor	
32		Kab. Tanjab. Barat	- Pengadaan Ternak Sapi	200 ekor	
33			- Pengadaan Ternak Kambing	20 ekor	
34			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	500 ekor	
35			- Pengadaan Ternak Itik Lokal	500 ekor	
36		Kab. Muaro Jambi	- Pengadaan Ternak Sapi	220 ekor	
37			- Pengadaan Ternak Kambing	275 ekor	
38			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	5.500 ekor	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
39		Kota Jambi	- Pengadaan Ternak Itik Lokal	400 ekor	
40		Kota Sungai Penuh	- Pengadaan Ternak Sapi	50 ekor	
41			- Pengadaan Ternak Kambing	100 ekor	
42			- Pengadaan Ternak Ayam Lokal	500 ekor	
43			- Pengadaan Ternak Itik Lokal	1.000 ekor	
44			- Penyediaan Bibit Rumput	5 Ha	
IV	Sub Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
1	Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Merangin	- Pupuk Non Subsidi NPK (Komoditi Kentang)	10.000 kg	Kec. Jangkat Timur, Lembah Masurai, jangkat
2			- AUTP	1000 Ha	Kec. Tabir Ulu, Kec. Tabir, Pangkalan Jambu, margo Tabir
3			- Cultivator	30 Unit	Kec. Jangkat, Pamenang, Jangkat Timur, Bangko, Tabir, Batang Masumai, Tabir Ulu, Tabir Lintas, Pamenang Selatan, Muara Siau, Margo Tabir, Tabir Selatan, Renah Pamenang, Pamenang Barat
4			- Hand Traktor	20 Unit	Kec. Jangkat, Pamenang, jangkat Timur, bangko, Tabir batang Masumai, tabir Ulu, Tabir Lintas, Pamenang Selatan
5			- Hidrotiller	10 Unit	Kec. Jangkat, Jangkat Timur, Pangkalam Jambu, Tabir, Sungai Manau, Renah Pembarap
6			- Pompa Air 4 inch	3 Unit	Kec. Jangkat, Pamenang, Tabir
7			- Power Thresher	10 Unit	Kec. Muara Siau, Margo Tabir, Tabir Selatan, Bangko, Pamenang Barat
8			- Corn Sheller	5 Unit	Kec. Muara Siau, Margo Tabir, Tabir Selatan, Bangko, Pamenang Barat
9		Kab. Kerinci	- AUTP	1.000 Ha	Kab. Kerinci
10			- Cultivator	10 Unit	Kec. Kayu Aro, Gunung Kerinci, Depati VII dan Siulak
11			- Pompa Air	12 Unit	Kec. Kayu Aro, Gunung Kerinci, Depati VII dan Siulak
12			- Power Thresher	10 Unit	Kec. Kayu Aro, Gunung Kerinci, Depati VII, Siulak, Siulak Mukai, Air Hangat Timur, Keliling Danau, Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
13			- Mini Transplanter	18 Unit	Kec. Kayu Aro, Gunung Kerinci, Depati VII dan Siulak
14			- Corn Sheller	5 Unit	Kec. Danau Kerinci, Gunung Kerinci
15		Kab. Bungo	- AUTP	1.000 Ha	Kec. Rantau Pandan
16			- Cultivator	2 Unit	Kec. Tanah Tumbuh
17			- Pompa Air	2 unit	Kec. Tanah Sepenggal
18			- Power Thresher	5 Unit	Kec. Tanah tumbuh, Tanah Sepenggal, Tn. Sepenggal Lintas, Rantau Pandan, Bathin III Ulu
19			- Corn Sheller	1 Unit	Kec. Jujuhan Ilir
20		Kab. Batanghari	- AUTP	2500 Ha	Kec. Maro Sebo Ulu, Mersam, Batin XXIV, Muara Tembesi, Maro Sebo Ilir, Muara Bulian dan Pelayung
21			- Traktor Roda 2 (dua) Singkal	15 Unit	Kec. Maro Sebo Ulu, Mersam, Batin XXIV, Muara Tembesi, Maro Sebo Ilir dan Muara Bulian
22			- Traktor Roda 2 (dua) Rotary	15 Unit	Kec. Maro Sebo Ulu, Mersam, Batin XXIV, Muara Tembesi, Maro Sebo Ilir, Muara Bulian dan Pelayung
23			- Handsprayer	35 Unit	Kec. Maro Sebo Ulu, Mersam, Muara Tembesi, Maro Sebo Ilir, Muara Bulian dan Pelayung
24			- Capung Rawa	20 Unit	Kec. Muara Bulian, Pelayung, Muara Tembesi
25			- Pupuk Non Subsidi (Urea dan NPK) Komoditi Sayuran	100 Ton	Muara Bulian, Pelayung, Maro Sebo Ilir, Bajubang, Batin XXIV
26			- Power Thresher	3 Unit	Kec. Maro Sebo Ilir, Muara Tembesi dan Pelayung
27		Kab. Sarolangun	- AUTP	1000 Ha	Kec. Pelawan, Kec. Batang Asai, Kec. Air Hitam, Kec. Sarolangun
28			- TR 2 Singkal	10 Unit	Kec. Pelawan, Kec. Air Hitam
29			- Cultivator	24 Unit	Kec. Singkut, Kec. Sarolangun, Kec. Bathin VIII
30			- Hydro Tiller	10 Unit	Kec. Pelawan, Kec. Batang Asai
31			- Pupuk Non Subsidi Komoditi Sayuran (Urea dan NPK)	20 Ton	Sarolangun, Pelawan, Singkut, Mandiangin, Bathin VIII
32			- Power Thresher	5 Unit	Kab. Sarolangun
33		Kab. Tebo	- AUTP	600 Ha	Kec. VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai serumpun, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir
34			- Handsprayer	48 Unit	Kec. Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai serumpun, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
35			- Cultivator	10 Unit	Kec. Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai serumpun, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir
36			- Pompa Air 3 Inch	15 Unit	Kec. Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai serumpun, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir
37			- Handtraktor Roda Dua (Rotary)	15 Unit	Kec. Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai serumpun, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir
38			- Handtraktor Roda Dua (singkal)	15 Unit	Kec. Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai serumpun, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir
39			- Traktor Roda Empat	12 Unit	Kec. Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai serumpun, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir
40			- Power Thresher	9 Unit	Kec. Tebo Ilir, Tengah Ilir, Tebo Tengah, Sumay, Tebo Ulu, Serai Serumpun, VII Koto, VIII Koto Ilir, Muara Tabir
41		Kab. Tanjab. Timur	- AUDP	1.000 Ha	Kec. Muara Sabak Timur, Kec. Berbak, Kec. Rantau Rasau
42			- Cultivator	10 Unit	Kec. Muara Sabak Timur, Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Dendang, Kec. Mendahara Ulu, Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kec. Nipah Panjang
43			- Pompa Air 4 Inch	3 Unit	Kec. Muara Sabak Timur, Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Dendang, Mendahara, Kec. Rantau Rasau, Kec. Nipah Panjang
44			- Power Thresher	14 Unit	Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Geragai, Kec. Rantau Rasau, Kec. Berbak
45			- RMU	4 Unit	Muara Sabak Timur, Dendang, Mendahara
46			- Corn Seller	1 Unit	Kec. Rantau Rasau
47		Kab. Tanjab. Barat	- AUDP	500 Ha	Kec Batang Asam
48			- Hand Sprayer (Elektrik)	32 Unit	Kec. Pengabuan, Kec. Senyerang, Kec. Seberang Kota, Kec. Batang Asam, Kec. Bram Itam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
49			- Traktor Roda 4 (Rotary Tiller+Disc Plough)	3unit	Kec. Batang Asam, Kec. Betara
50			- Traktor Roda 2 (8,5 HP)	15 unit	Kec. Senyerang, Kec. Pengabuan, Kec. Batang Asam
51			- Power Thresher	5 Unit	Kab. Tanjab Barat
52		Kab. Muaro Jambi	- Hand Traktor R2	3 Unit	Kec Sekernan, Kec. Maro Sebo, Kec. Kumpeh
53			- Mesin Pompa Air 3 “	25 Unit	Kec. Sekernan, Kec. Maro Sebo, Kec. Kumpeh, Kec. Jaluko, Kec. Taman Rajo, Kec. Sungai Gelam, Kec. Sungai Bahar, Kec. Mestong
54			- Cultivator Komoditi Hortikultura	10 Unit	Kec Kumpeh,K Ulu, S.Gelam, Jambi Luar Kota
55			- Power Thresher	5 Unit	Kec. Sekernan, Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, Kumpeh, Maro Sebo
56		Kota Jambi	- Power Thresher Multiguna Padi dan Jagung	5 Unit	Kec, Pelayangan, Danau Teluk, Kota Baru
57			- Cultivator	10 Unit	Kec, Paal Merah, Telanaipura, Pelayangan
58			- Pompa Air 3 inch	4 Unit	Kec, Telanaipura, Danau Teluk, Paal Merah
59			- Hand Sprayer	16 Unit	Kec, Jambi Selatan, Paal Merah, Kota Baru, Telanaipura
60			- Pupuk Non Subsidi (Urea dan NPK)	100 Ton	Kec. Paal Merah, Alam Barajo, Kota Baru
61		Kota Sungai Penuh	- Pupuk Non Subsidi NPK (Komoditi Alpukat dan Jeruk)	4 Ton	Kec. Tanah Kampung, Kec. Pesisir Bukit, Kec. Hamparan Rawang, Kec. Kumun Debai
62			- AOTP	200 Ha	Kec. Tanah Kampung, Kec. Pesisir Bukit, Kec. Hamparan Rawang, Kec. Kumun Debai
63			- Pupuk Hayati	4.000 Liter	Kec. Sungai Penuh, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Pesisir Bukit, Koto Baru, Hamparan Rawang, Kumun Debai, Tanah Kampung
64			- Cultivator	10 Unit	Kec. Sungai Bungkal, Kec. Pondok Tinggi, Kec. Pesisir Bukit, Kec. Koto Baru, Kec. Sungai Penuh, Kec. Hamparan Rawang, Kec. Kumun Debai, Kec. Tanah Kampung
65			- Pompa Air 3 Inch	3 Unit	Kec. Hamparan Rawang, Kec. Tanah Kampung, Kec. Kumun Debai
66			- Power Thresher	5 Unit	Kec. Sungai Bungkal, Kec. Pondok Tinggi, Kec. Pesisir Bukit, Kec. Koto Baru, Kec. Sungai Penuh

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
67			- Hidro Tiller	20 Unit	Kec. Sungai Penuh, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Pesisir Bukit, Koto Baru, Hamparan Rawang, Kumun Debai, Tanah Kampung
68			- Traktor Roda 2 Rotary	4 Unit	Kec. Pondok Tinggi, Sungai Bungkal, Pesisir Bukit, Kumun Debai
69			- Hand Sprayer Elektrik	20 Unit	Kec. Sungai Penuh, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Pesisir Bukit, Koto Baru, Hamparan Rawang, Kumun Debai, Tanah Kampung

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

RPJMN Tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025, terutama pendapatan perkapita Indonesia yang ditargetkan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country/MIC). Pembangunan nasional digambarkan sebagai pembangunan bangsa yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : “Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil

pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sesuai” berasal dari suai yang artinya berpadanan (dengan); berpatutan (dengan); selaras. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Secara jumlah terjadi pengurangan terhadap jumlah misi yang disampaikan pada saat kampanye, namun secara substansi ketiga misi yang ditetapkan selaras dengan misi saat kampanye. Berdasarkan hasil *cascading* yang dilakukan, dua diantara lima misi yang dilaksanakan pada saat kampanye lebih tepat sebagai sasaran pada

misi memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 serta Renstra Dinas Tanamania Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2021-2026, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan pertanian adalah :

“Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan Pertanian yaitu :

“Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan Indeks Ketahanan Pangan”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jambi diatas, untuk mencapai sasaran daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tujuan dan sasarannya yaitu :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024	2025
Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan public dan keuangan	Meningkatnya kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan	Nilai SAKIP	76 (BB)	78 (BB)
		Skor IKM	83	83
	Meningkatnya Pendapatan/retribusi OPD	Persentase peningkatan pendapatan/ retribusi OPD	15	15
Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi padi (%)	2,00	2,00
		Persentase peningkatan produksi jagung (%)	1,00	1,00
		Persentase peningkatan produksi Cabe Merah (%)	20	20
		Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (%)	10	10
	Meningkatnya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	25,03	25,32

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024	2025
Meningkatakan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan	Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi sapi (%)	1,5	1,5
		Persentase peningkatan populasi kambing (%)	1,5	1,5
	Meningkatnya produksi daging	Persentase peningkatan produksi daging sapi (%)	2,5	2,39
		Persentase peningkatan produksi daging kambing (%)	1	1,8
	Meningkatnya produksi unggas	Persentase peningkatan produksi ayam buras (%)	5,5	5,52
		Persentase peningkatan produksi ayam ras petelur (%)	10	10,47
		Persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging (%)	15	15,01
		Persentase peningkatan produksi itik (%)	0,35	0,40

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebanyak 7 (tujuh) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin pada dan 6 (enam) program urusan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
3. Setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dilakukan pemetaan ulang program, kegiatan, dan subkegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
4. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai pemetaan nomenklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) subkegiatan.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2024 dijabarkan pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025
 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)
1.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan (Laporan)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian (Laporan)
1.3.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)
2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Kab/Kota)
2.1.1	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)
2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu
2.2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)
2.2.2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan Harga (Laporan)
2.2.3	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)
2.2.4	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)
2.3	Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Kab/Kota)
2.3.1	Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)
2.3.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)
2.4	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (Kab/Kota)
2.4.1	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)
2.4.2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
3.1	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis (Dokumen)
3.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)
3.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya keswan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi (%)
4.1	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Kab/Kota)
4.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)
4.2	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak (Kab/Kota)
4.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)
4.3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sampel)
4.3.1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen)
4.4	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
4.4.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%)
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)
5.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)
5.1.3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Ha)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
6.1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota
6.1.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)
6.1.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)
6.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasiskawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak (Kab/Kota)
6.2.1	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas pembangunan pertanian Tahun 2025 merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan kelanjutan dari prioritas pembangunan pertanian tahun 2024. Prioritas pembangunan pertanian tersebut ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan,** dengan sasaran yaitu terlaksananya kemandirian pangan di daerah dan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta terlaksananya penyediaan produk pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. **Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan,** dengan sasaran yaitu terlaksananya Penyediaan dan perbaikan Sarana Prasarana pertanian di daerah.

Program dan kegiatan Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				50.230.196.795				165.857.000.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	39.042.685.083			A	75.945.000.000
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengangara (Dokumen)	Kota Jambi	9	1.227.304.309	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		9	2.450.000.000
3	27	01	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		15	457.304.309			15	1.150.000.000
3	27	01	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)		7	240.000.000			7	800.000.000
3	27	01	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	530.000.000			2	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan (Laporan)	Kota Jambi	5	36.045.248.486	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		5	66.150.000.000
3	27	01	1.02	.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		3.864	35.341.112.486			3.864	65.000.000.000
3	27	01	1.02	.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	704.136.000			12	1.150.000.000
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian (Laporan)	Kota Jambi	3	309.272.400	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		3	750.000.000
3	27	01	1.05	.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		7	309.272.400			7	750.000.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)	Kota Jambi	7	183.324.388	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		7	1.145.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	01	1.06	.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	8.935.030			12	50.000.000
3	27	01	1.06	.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	9.990.500			12	400.000.000
3	27	01	1.06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		10	19.704.018			10	40.000.000
3	27	01	1.06	.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		12	19.700.000			12	80.000.000
3	27	01	1.06	.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	4.994.840			12	75.000.000
3	27	01	1.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	120.000.000			12	500.000.000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	Kota Jambi	118	50.000.000	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		142	300.000.000
3	27	01	1.07	.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		100	50.000.000			120	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)	Kota Jambi	4	827.535.500	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		4	1.350.000.000
3	27	01	1.08	.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	677.340.000			12	1.000.000.000
3	27	01	1.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	9.195.500			12	90.000.000
3	27	01	1.08	.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	141.000.000			12	260.000.000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	Kota Jambi	437	400.000.000	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		462	3.800.000.000
3	27	01	1.09	.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		375	300.000.000			400	1.800.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	01	1.09	.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		12	100.000.000			12	2.000.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)		21	4.594.078.135			23	71.372.000.000
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	1.235.980.400	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	4.400.000.000
3	27	02	1.01	.01	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		11	1.136.000.000			11	2.850.000.000
3	27	02	1.01	.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)		1	99.980.400			1	1.550.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	1.017.297.735	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	12.678.000.000
3	27	02	1.02	.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		133	336.000.000			146	439.000.000
3	27	02	1.02	.05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat anaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan Harga (Laporan)		11	615.397.110			11	1.489.000.000
3	27	02	1.02	.07	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		25.000	27.495.625			30.000	1.750.000.000
3	27	02	1.02	.013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Biji/Benih Berbentuk	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang Diperbanyak (Ton)		300	38.405.000			350	9.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	02	1.04		Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	876.000.000	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	29.472.000.000
3	27	02	1.04	.01	Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)		8	86.000.000			8	1.200.000.000
3	27	02	1.04	.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)		4	790.000.000			4	2.600.000.000
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	1.464.800.000	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	24.822.000.000
3	27	02	1.07	.02	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)		600	392.800.000			750	850.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	02	1.07	.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		9.000	1.072.000.000			10.000	23.972.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)		17	4.250.521.185			19	13.500.000.000
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis (Dokumen)	11 Kab/Kota	11	4.250.521.185	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	13.500.000.000
3	27	3	1.01	.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		7	1.508.410.650			7	2.463.000.000
3	27	3	1.01	.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		11	100.000.000			11	4.837.000.000
3	27	3	1.01	.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		6	2.642.110.535			6	6.200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya keswan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi (%)		10	1.198.000.561			12	2.750.000.000
3	27	4	1.01		Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	374.000.000	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	1.000.000.000
3	27	4	1.01	.07	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)		11	374.000.000			11	1.000.000.000
3	27	4	1.02		Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	139.000.000	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	4	1.02	.07	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)		11	139.000.000			11	500.000.000
3	27	4	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sampel)	11 Kab/Kota	3000	500.000.561	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		3000	900.000.000
3	27	4	1.03	.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen)		1	500.000.561			1	900.000.000
3	27	4	1.05		Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		18	185.000.000	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		21	350.000.000
3	27	4	1.05	.03	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]		15	185.000.000			17	350.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%)		10	498.138.645			10	950.000.000
3	27	5	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT,Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	498.138.645	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	950.000.000
3	27	5	1.01	.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		150	474.768.645			150	700.000.000
3	27	5	1.01	.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		16	8.970.000			18	110.000.000
3	27	5	1.01	.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Ha)		6	14.400.000			7	140.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian di Kabupaten / kota (%)		10	-			1	400.000.000
3	27	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	11 Kab/Kota	3	-	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		1	450.000.000
3	27	6	1.01	.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Laporan)		3	-			1	175.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)		2	646.773.186			2	940.000.000
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota		11	341.826.750	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	440.000.000
3	27	7	1.02	.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)		5	62.868.000			5	140.000.000
3	27	7	1.02	.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		35	278.958.750			40	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11	304.946.436	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat		11	500.000.000
3	27	7	1.03	.05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)		19	304.946.436			22	500.000.000

BAB V

PENUTUP

Tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dapat mensinergikan program dan kegiatan Kabupaten/Kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan pertanian di Provinsi Jambi.

Jambi, Oktober 2024

KEPALA DINAS,



Ir. RUMUSDAR

Pembina Utama Madya

NIP. 19680102 199203 1 007